

Garuda Indonesia



Materi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

30 Mei 2023

**GROWING WITH RESILIENCE
READY TO FLY HIGHER**



Garuda Indonesia



MATA ACARA

Mata Acara Rapat

1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2022.

3

Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.

4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2023.

Mata Acara Rapat

5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

6

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia:

- a. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya.
- b. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya.
- c. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya.

7

Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

8

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

9

Perubahan Pengurus Perseroan.



Mata Acara 1



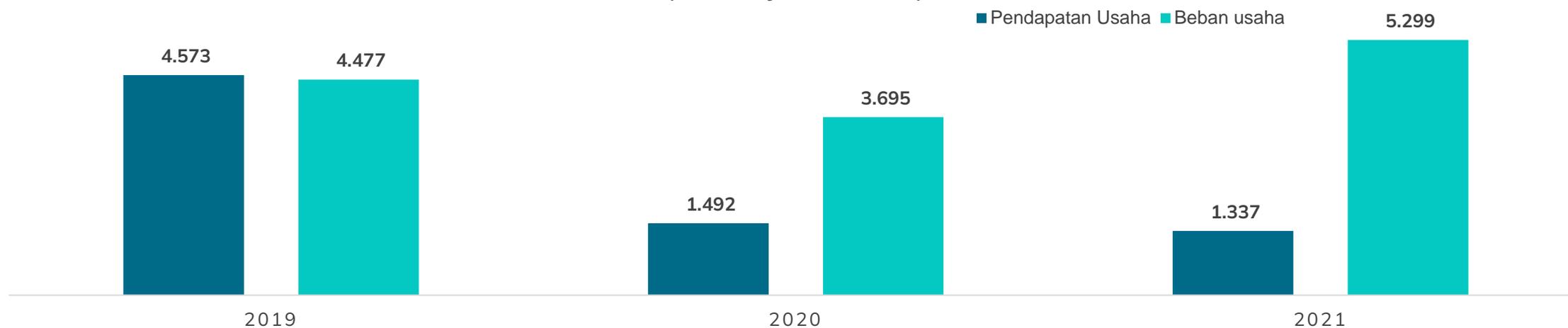
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Pandemi Covid-19 membawa industri penerbangan ke titik terendahnya sepanjang kiprah industri penerbangan berlangsung (IATA-2021)

Situasi pandemi Covid-19 sekaligus membuka kotak pandora kompleksitas kinerja usaha Garuda Indonesia. Pendapatan usaha jatuh signifikan dengan tekanan beban usaha yang berdampak sistemik terhadap kondisi likuiditas dan solvabilitas kinerja usaha

Kinerja Keuangan GA Group 2019- 2021

(DALAM JUTAAN USD)



Komposisi Organisasi dan Market View yang tidak selaras



Problem Tata Kelola Perusahaan



Beban Sewa Pesawat yang tidak kompetitif



Cost Structure yang tidak adaptif

Optimalisasi Bisnis dan Inisiatif Pre-PKPU



Cost-cutting melalui pengelolaan *human capital*



Negosiasi skema baru *lease rate*



Menjaga kualitas tingkat ketepatan waktu penerbangan di tengah situasi pandemi



Value Propositions & Improving Service Experience

Outlook Kinerja Usaha Yang Dibayangi Ketidakpastian & Secara Fundamen Dalam Kondisi “Red Flag”

\$10,1 Bio

Total Utang

\$5,3 Bio

Ekuitas Negatif

-90%

Trafik & Revenue

70 %

Aircraft Grounded

Fase Restrukturisasi (PKPU): Good-Will, Good Faith, Openness

Restrukturisasi yang dijalankan Garuda Indonesia melalui tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melibatkan ragam latar belakang hukum entitas dan organisasi baik vendor local maupun asing dengan preferensi yang beragam dalam penyelesaian kewajiban usaha

800+
Kreditur

- Institusi Pemerintah
- Lessor
- BUMN dan Afiliasinya
- Vendor Lokal
- Vendor Asing
- Bank BUMN & BUMN lainnya
- Bank Swasta
- Lembaga & Instrumen Keuangan Lain
- Afiliasi Garuda
- Kategori kreditur lainnya

Hasil Voting Berdasarkan Jumlah Kehadiran Kreditur (Headcount)



Hasil Voting Berdasarkan Nilai Klaim Kreditur



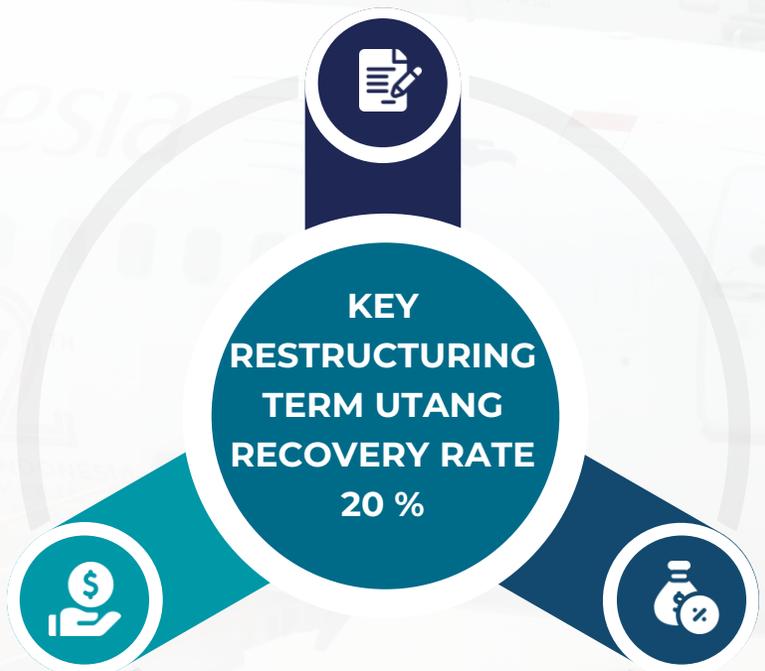
Highlight Perjanjian Perdamaian Pada Proses PKPU (1)

Ekuitas Baru

Penerbitan ekuitas baru melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai porsi ekuitas baru yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Perdamaian Disamping itu, diterbitkan juga ekuitas melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Surat Utang Baru, Sukuk Baru, dan Klaim Utang Lokal

Diterbitkan Surat Utang Baru sebesar USD 624 Juta, Sukuk Baru sebesar USD 78 Juta, dan Klaim utang lokal USD 1.2 juta; dengan tenor 9 tahun | bunga: 6,50% p.a. dalam bentuk kas atau, pada dua tahun pertama, 7,25% PIK



KEY
RESTRUCTURING
TERM UTANG
RECOVERY RATE
20 %

Utang Jangka Panjang

Skema pembayaran utang terhadap Bank, BUMN dan Anak Perusahaan yang telah direstrukturisasi menjadi selama 22 tahun dengan suku bunga sebesar 0.1%.

Highlight Perjanjian Perdamaian Pada Proses PKPU (2)

Kreditur < Rp 255 juta
Dilunasi secara penuh melalui arus kas perusahaan (telah dilakukan)



Kreditur Preferen
OWK – SMI: Dikonversi menjadi Saham
Kreditur Preferen lainnya: Dilunasi secara bertahap melalui arus kas perusahaan

Highlight Perjanjian Perdamaian Pada Proses PKPU (3)

Key Restructuring Terms Kontrak Sewa Pesawat Moving Forward

Implementasi Periode Power by the Hour

Narrow-body: 9 Des 2021-31 Des 2022 dan Wide-body : 9 Des 2021- 30 Jun 2023



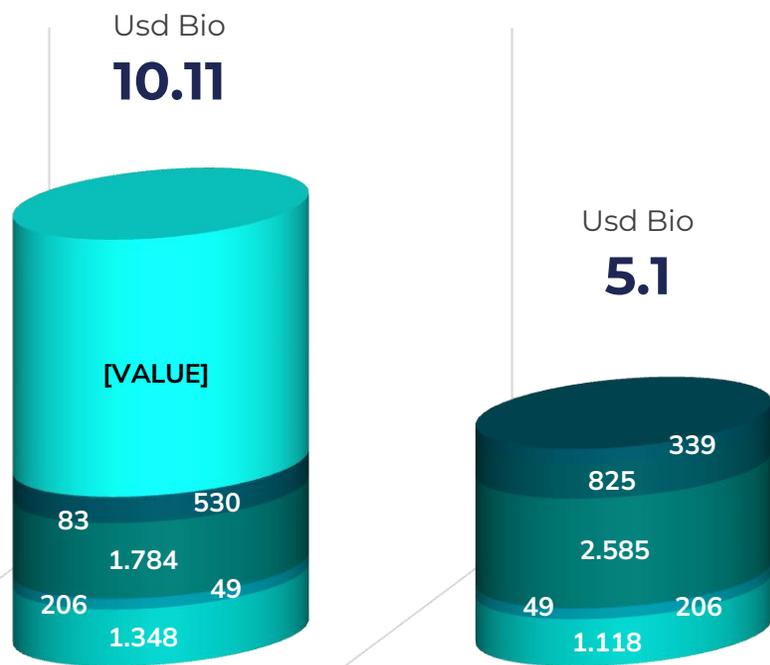
Penurunan Total Fleet

Penurunan total pesawat sewa (GA dan QG) dari 196 per 31 Des 2020A ke 119 pesawat4 per 31 Des 2022F (94 NB, 26 WB)

Penurunan Lease Rates

Narrow-body: penurunan rata-rata sebesar ~31%, dan Wide-body: penurunan rata-rata sebesar ~55%

Penurunan Nilai Utang Pasca PKPU



Sebelum Restrukturisasi

Setelah Restrukturisasi

- Utang Anper
- OWK
- Utang BUMN
- SUKUK
- Unsecured Claim Lainnya
- Long-term Loan dan Long-term Payable
- Utang Prioritas
- EDC
- KIIK EBA
- Capitalized Lease Liabilities
- New Coupon Debt



Penurunan Tarif Sewa Pesawat (Ribuan USD)

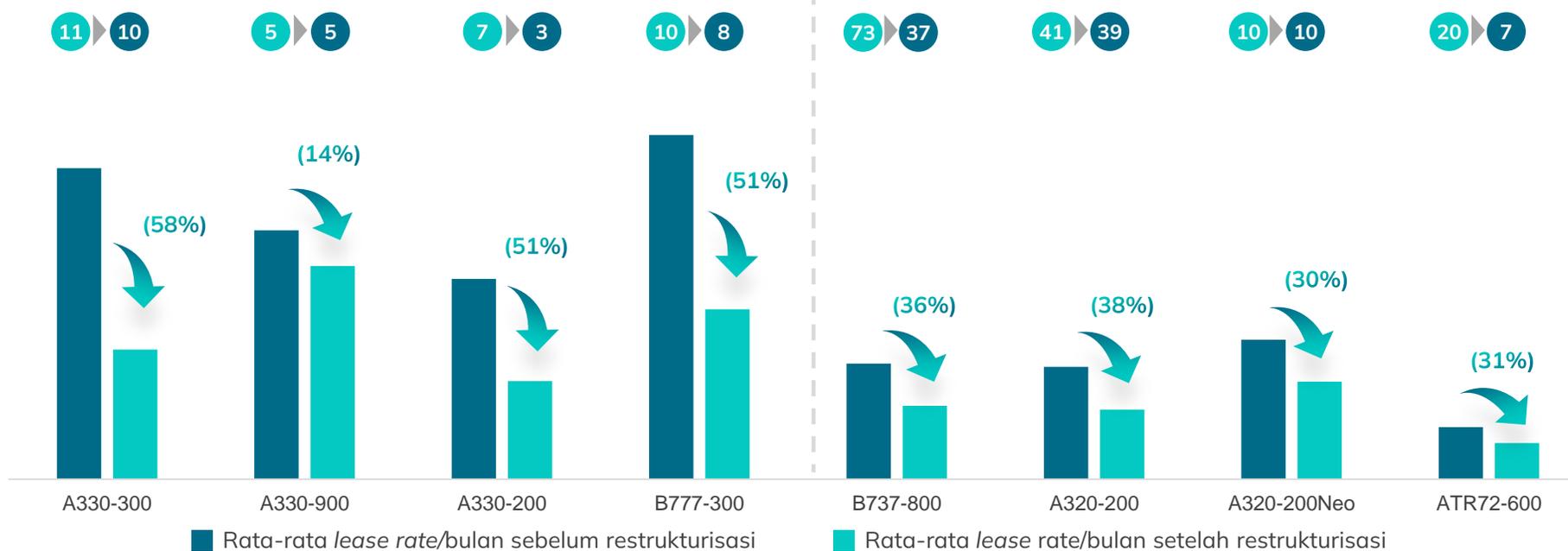
Pesawat Wide-body (WB)

Pesawat Narrow-body (NB)

Jumlah Fleet Sebelum Restrukturisasi (Des-2020A):

 Jumlah Fleet Sebelum Restrukturisasi

 Jumlah Fleet Setelah Restrukturisasi (Des-2022F):



Key Driver 2022



Corporate Action 2022



Fleet Strategy



Commercial Strategy



Network Strategy



Financial Strategy

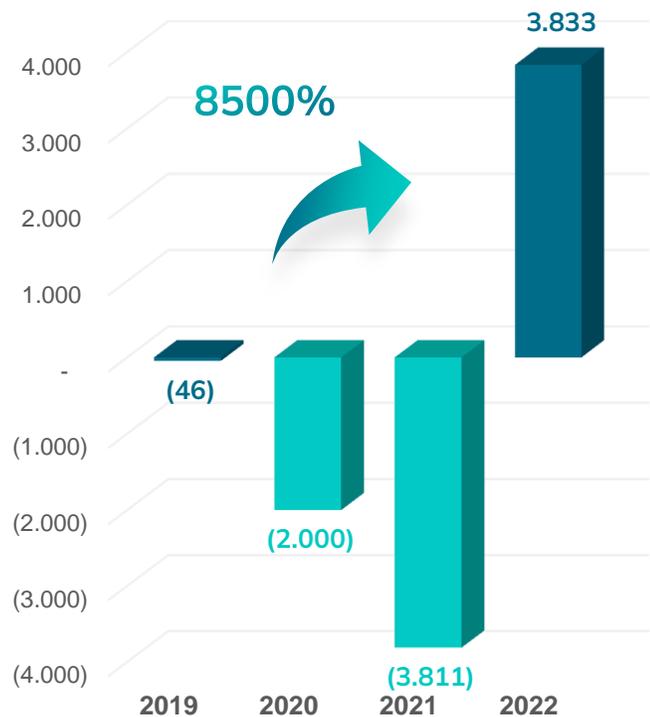


Supporting Strategy

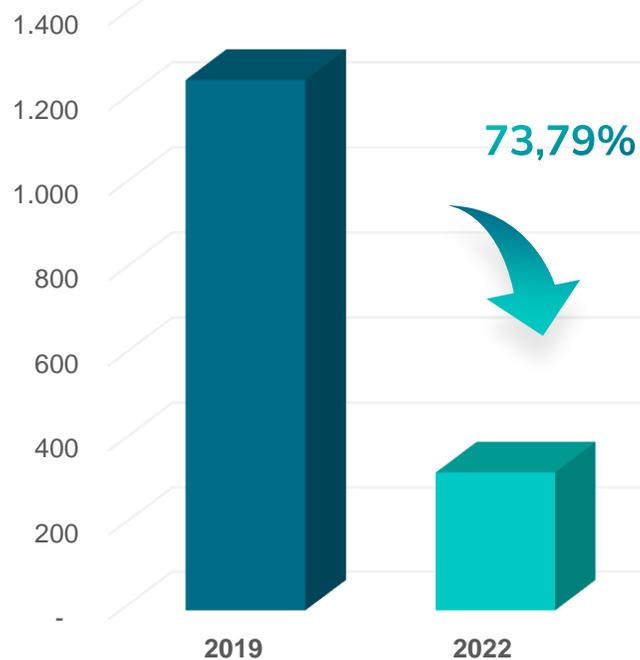
Penguatan Fundamen Kinerja Usaha 2022

Pasca Restrukturisasi (1)

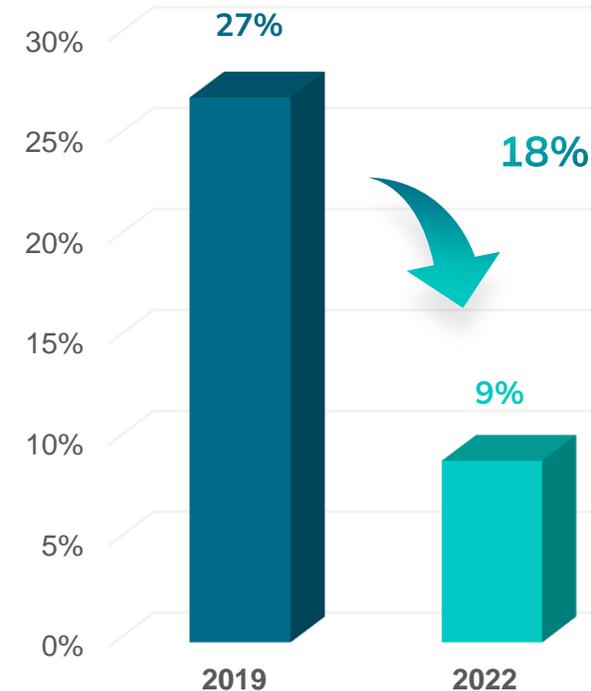
Net Income
(USD Mio)



Total Fixed Cost

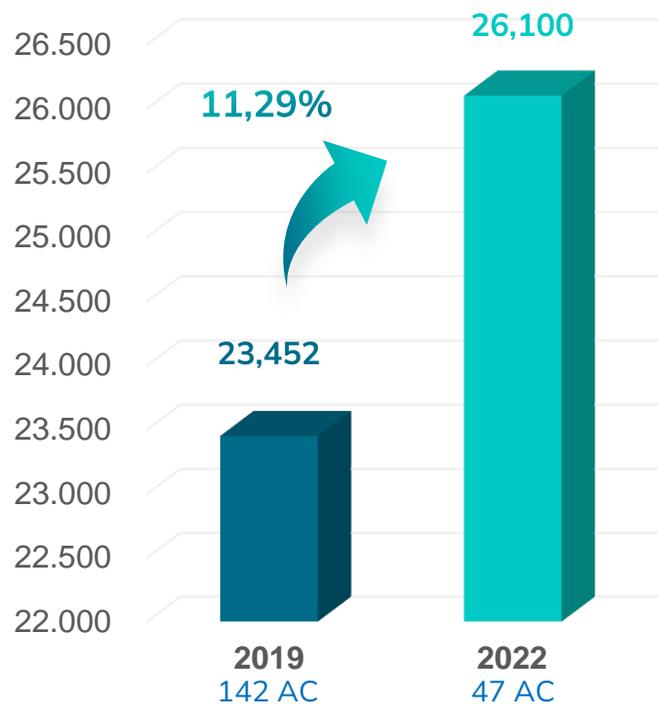


Lease Cost to Revenue

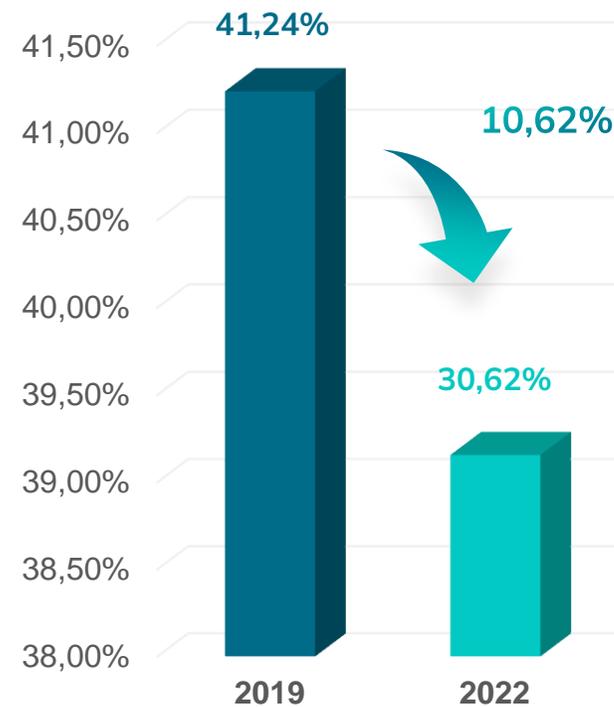


Penguatan Fundamen Kinerja Usaha 2022 Pasca Restrukturisasi (2)

**Average Revenue Per Aircraft
(USD)**

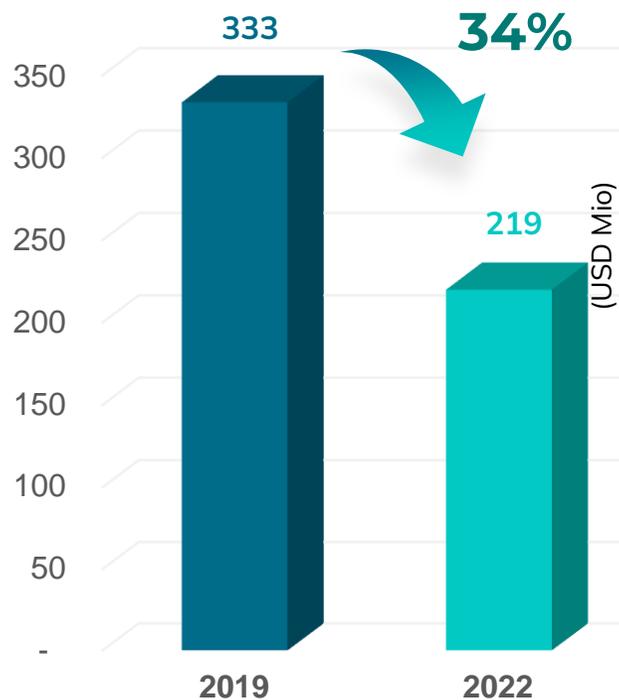


Fixed Cost to Revenue

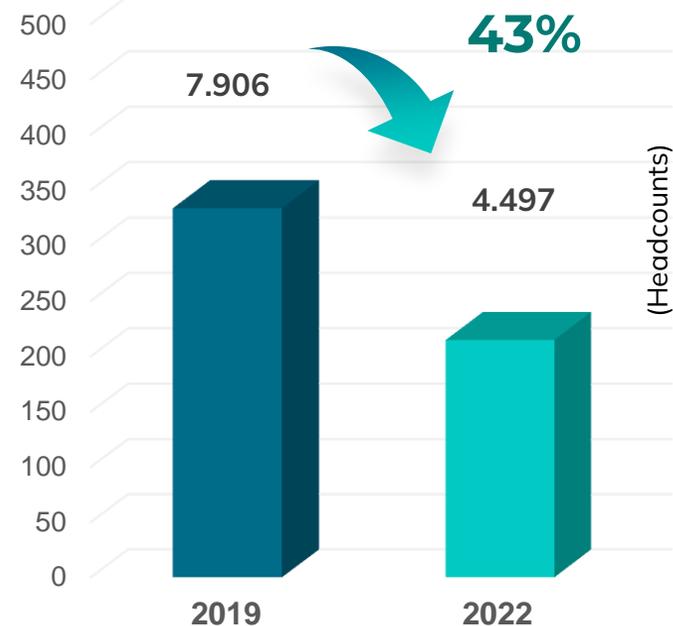


Penguatan Fundamen Kinerja Usaha 2022 Pasca Restrukturisasi (3)

Total Personal Expense
(USD Mio)

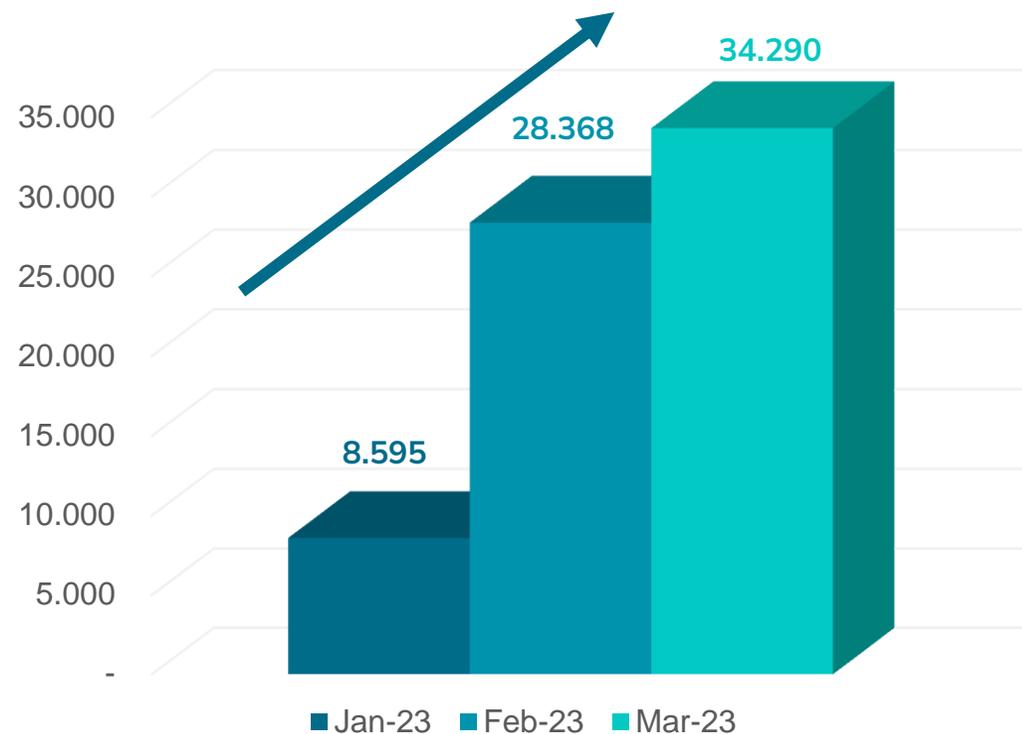


Manpower Size

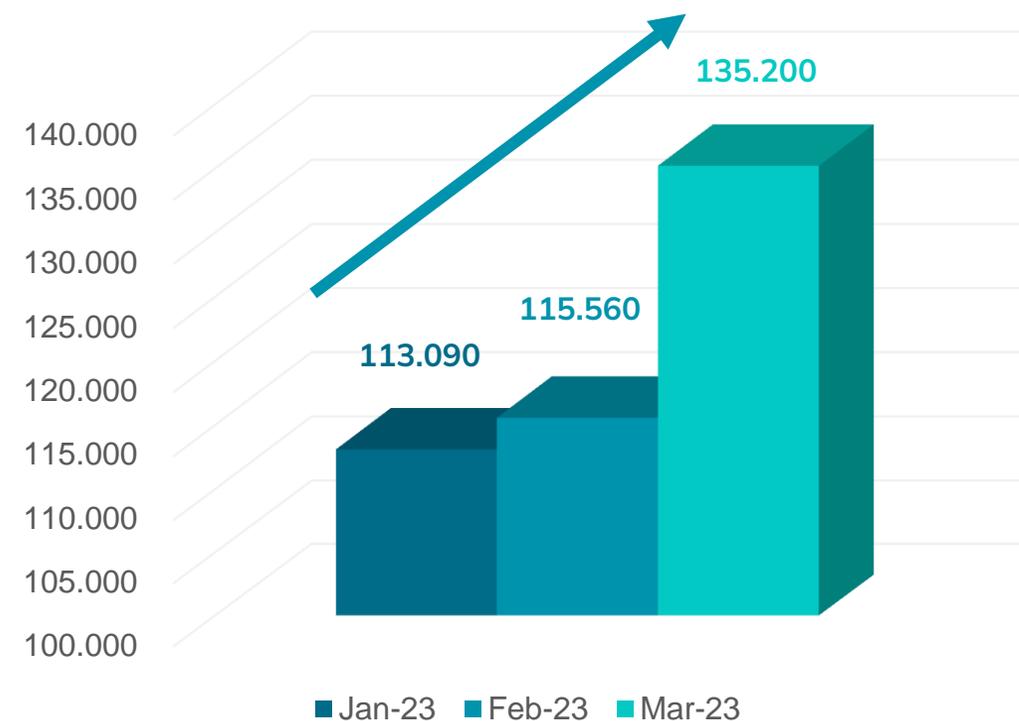


Outlook Kinerja Korporasi 2023 Memiliki Landasan Kinerja Keuangan yang Semakin Solid

EBITDA
(USD Mio)

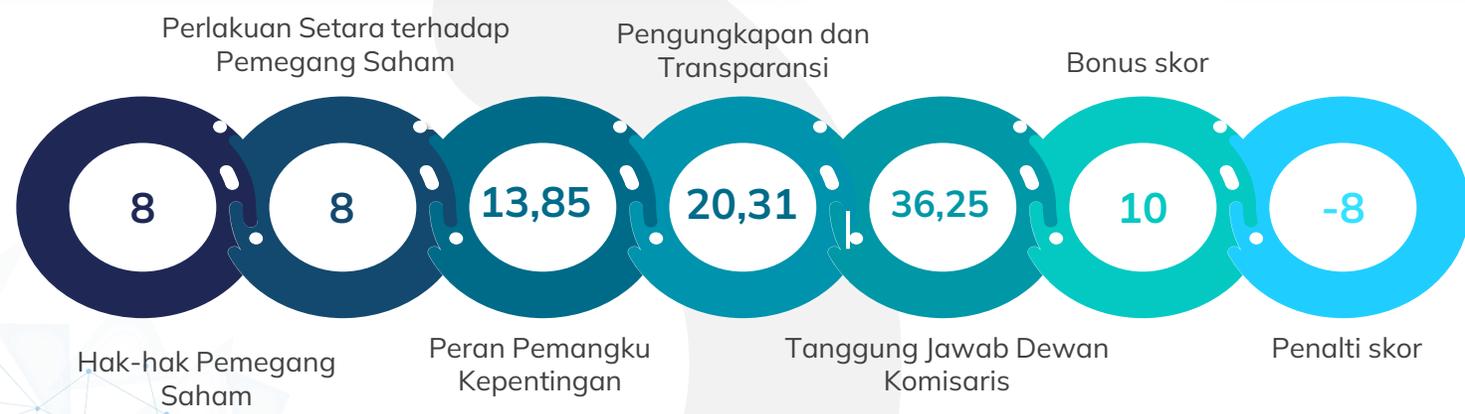


PENDAPATAN USAHA
(USD Mio)



Penguatan Tata Kelola Perusahaan

	2021		2022		Penjelasan
	Score	%	Score	%	
Penerapan GCG Berkelanjutan	6,50	92,86	6,81	97,28	Sangat Baik
Pemegang Saham & RUPS	8,56	95,13	8,45	93,99	Sangat Baik
Dewan Komisaris	30,86	88,18	33,00	94,29	Sangat Baik
Direksi	31,73	90,65	33,17	94,78	Sangat Baik
Informasi dan Transparansi	8,18	90,89	8,11	90,15	Sangat Baik
Aspek Lain	1,25	25,00	2,5	50,00	Sangat Baik
Total Score Keseluruhan	87,08	87,08	92,69	92,69	



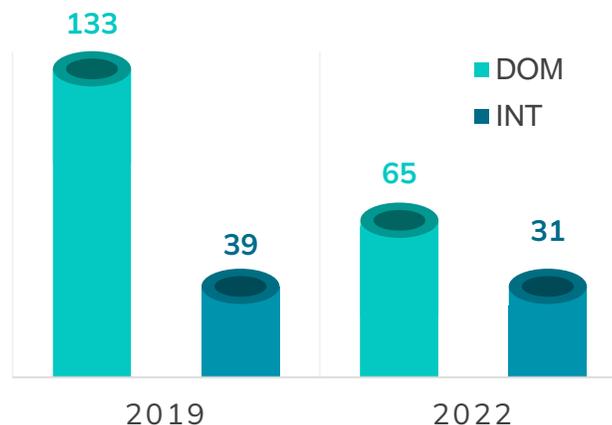
Total Skor ACGS 88,41

Optimizing GA Network and Strengthening Network-Partnership

JUMLAH ARMADA



JUMLAH RUTE

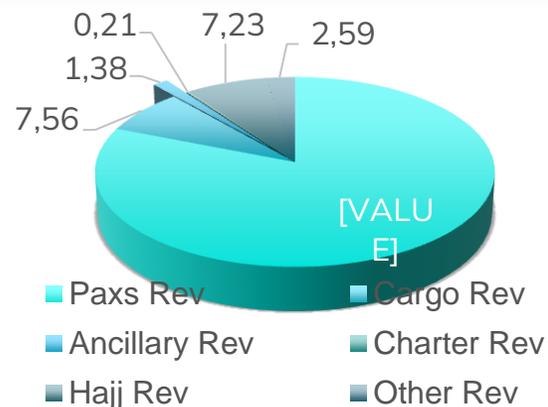


Komersial Index

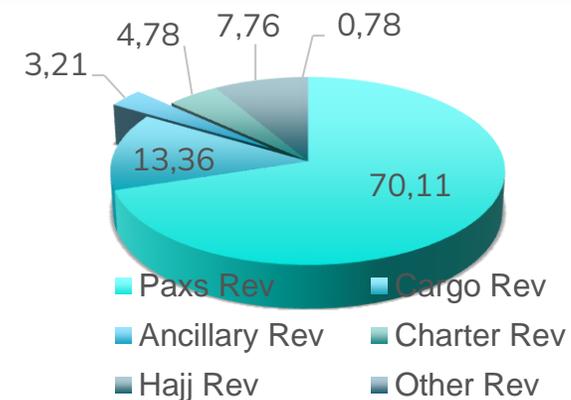
	2019	2022
Paxs Carried/Flight	138	151
Cargo/Flight (kg)	1.532	2.126
Revenue/Flight	15.101	20.141

Maximizing Revenue Opportunity

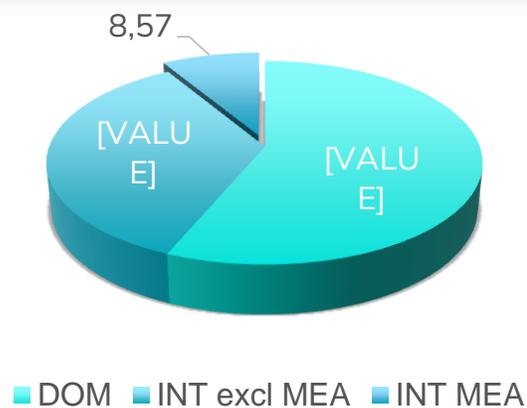
Revenue Stream (%) 2019



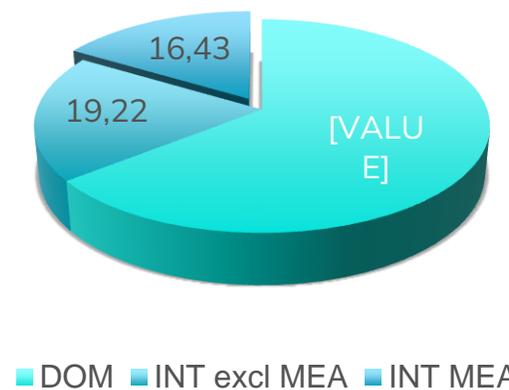
Revenue Stream (%) 2022



Proporsi Revenue (%) 2019



Proporsi Revenue (%) 2022



Service Enhancement & Marketing



Normalization Food & Beverages Services



Garuda Priority Service



New IFE content



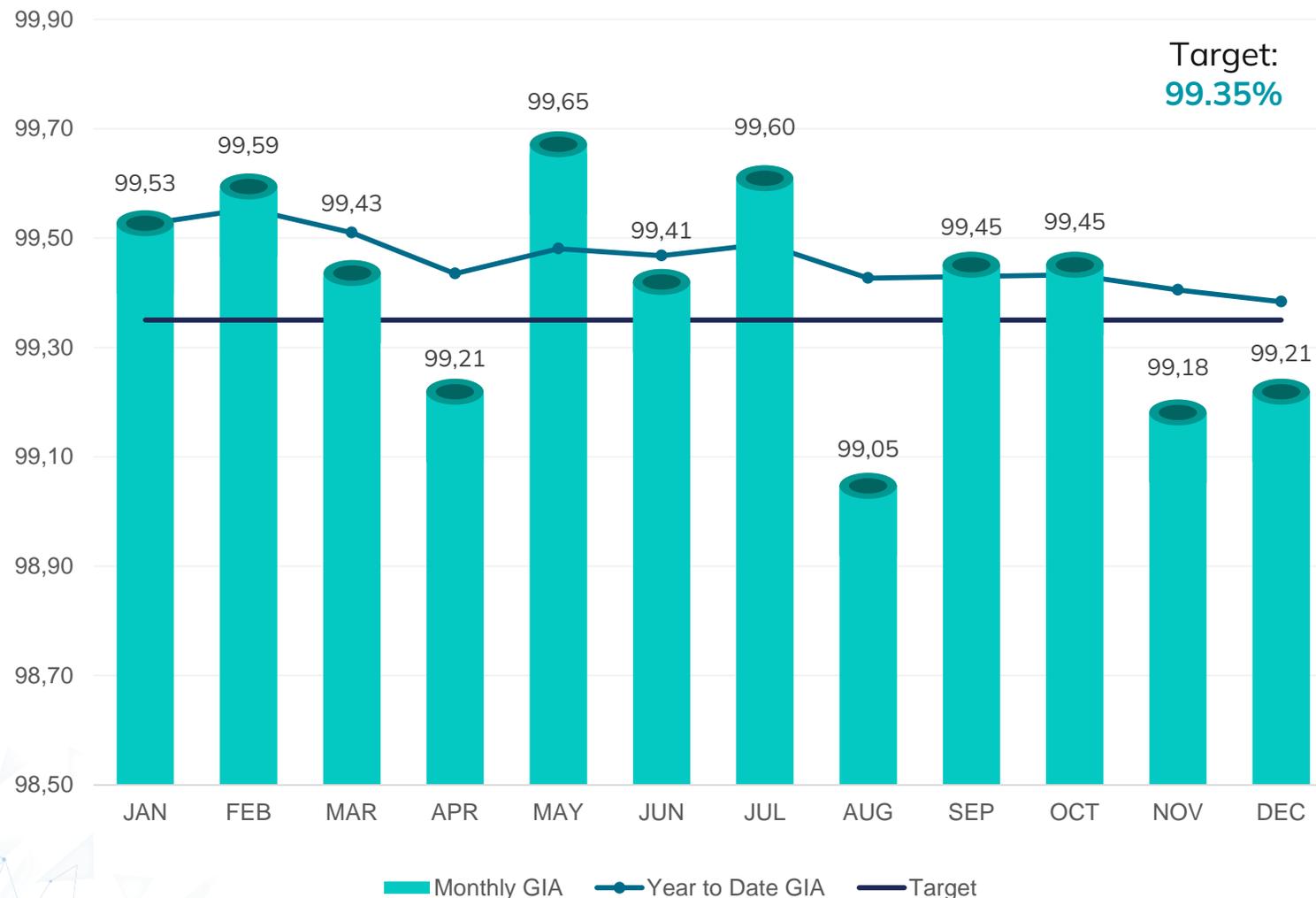
Launching Baby Stroller Services at CGK & DPS



Additional wheelchair



Kinerja Dispatch Reliability 2022



99.38%

Kinerja Dispatch Reliability selama tahun 2022 untuk seluruh armada Perseroan mencapai **99,38%** dimana memenuhi target KPI sebesar **99,35%**.

Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, kinerja dispatch reliability armada Perseroan adalah sebagai berikut :

- GIA B737-800: 99.49% Vs Worldwide 99.32%
- GIA B777-300ER: 98.97% Vs Worldwide 99.14%
- GIA A330: 98.87% Vs Worldwide: 98.84%

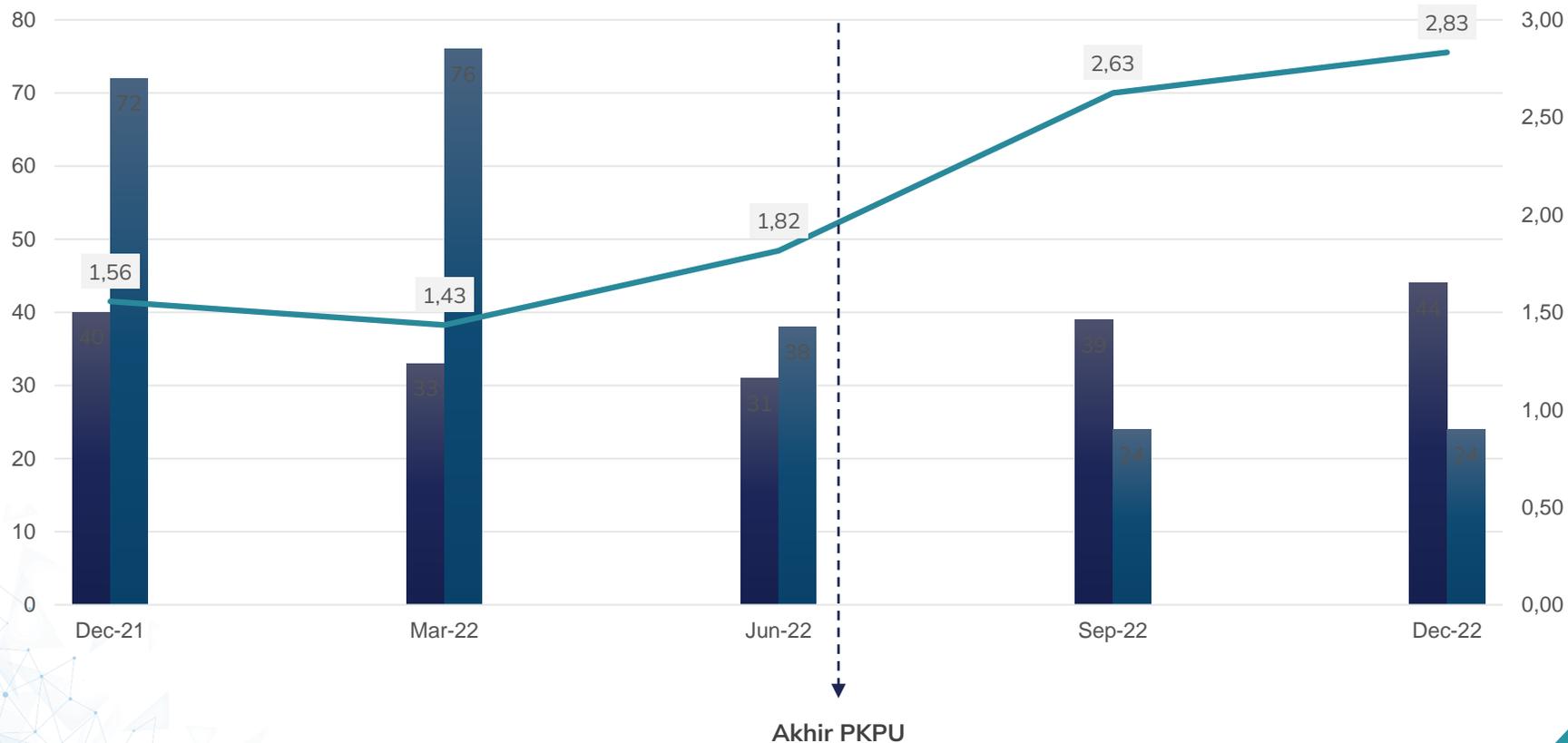
**Source Data : Boeing & Airbus*

Capaian Program Reaktivasi Pesawat

Garuda Indonesia Fleet Status 2021-2022

Garuda Indonesia Fleet Status 2021-2022

Serviceable Grounded Serviceable Ratio



Serviceable Ratio = Total Fleet / Jumlah Grounded

41%

Penambahan jumlah pesawat serviceable PKPU dengan adanya program reaktivasi pesawat dari 31 pesawat pada Juni 2022 menjadi menjadi 47 pesawat serviceable.

Jumlah pesawat grounded terus menurun dari 72 pesawat pada Desember 2021 menjadi sisa 24 pesawat pada Desember 2022 sehingga Serviceable Ratio terus meingkat. Reaktivasi pesawat sisa 24 pesawat grounded dilanjutkan tahun 2023.

Sorotan Teknologi Informasi (TI) 2022

Fokus TI : Rekalibrasi Arsitektur dan Penyelerasan Restrukturisasi

1 Optimalisasi Ekosistem TI

- Penerapan *microservice architecture*, skalabilitas infrastruktur dan layanan multi platform pada aplikasi pendukung penjualan.
- Penguatan Arsitektur Data dalam mendukung pengambilan keputusan dengan penerapan Route Profitability Intelligence
- Resiliensi system menghadapi berbagai macam resiko, dengan pencapaian SLA system sebesar 99,7%



2 Peningkatan efektivitas dan efisiensi TI

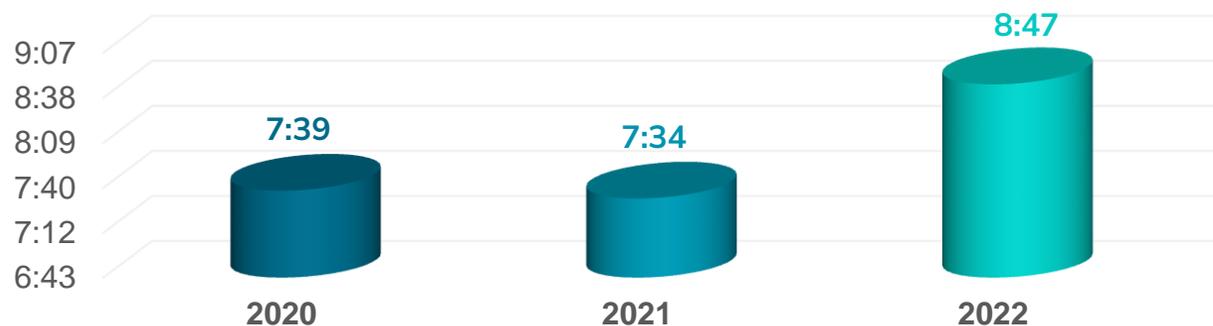
- Renegosiasi Kontrak Strategis Pada layanan network internasional dan Layanan sistem operasional terintegrasi
- Digitalisasi bisnis proses perusahaan serta automasi proses dengan penerapan Aircrew Mobie Apps dan juga eOffice

3 Peningkatan Digital Channel dan Customer Experience

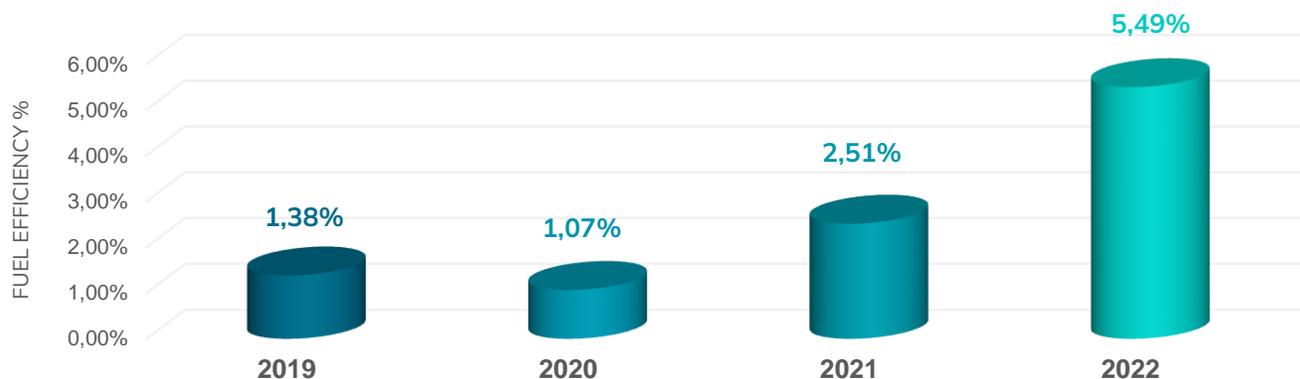
- Customer experiences dengan simplifikasi proses booking hingga payment
- Personalisasi perjalanan, berdasarkan pemahaman atas kebutuhan, preferensi

Aircraft Utilization & Fuel Optimization

Aircraft Utilization



Fuel Optimization Results vs Fuel Cost 2019-2022 (%)



Pada lini operasional, Implementasi fuel optimization dilakukan dengan inisiatif seperti Cost Index, Potable water, economical tankering, Engine Out – Taxi In Procedure, GPU Usage dan Reducing Landing Flaps

Highlights

Tren Positif Aircraft Utilization (hours) secara rata-rata pada sdi tahun 2022 meningkat dari 7:34 menjadi 8:47 di tahun 2022

Selama 2019-2022 program penghematan penggunaan fuel menunjukkan tren positif terlihat dari kenaikan persentasi Perbandingan antara Efisiensi Fuel yang berhasil dilakukan dibandingkan dengan biaya Total Fuel Cost yang dikeluarkan Perseroan

The Best OTP in 5 Star Airline (96.3%)

The Most Punctual Airline in the World (95,01%)

Most Punctual Airline in Asia Pacific (96,6%)

OAG[®]

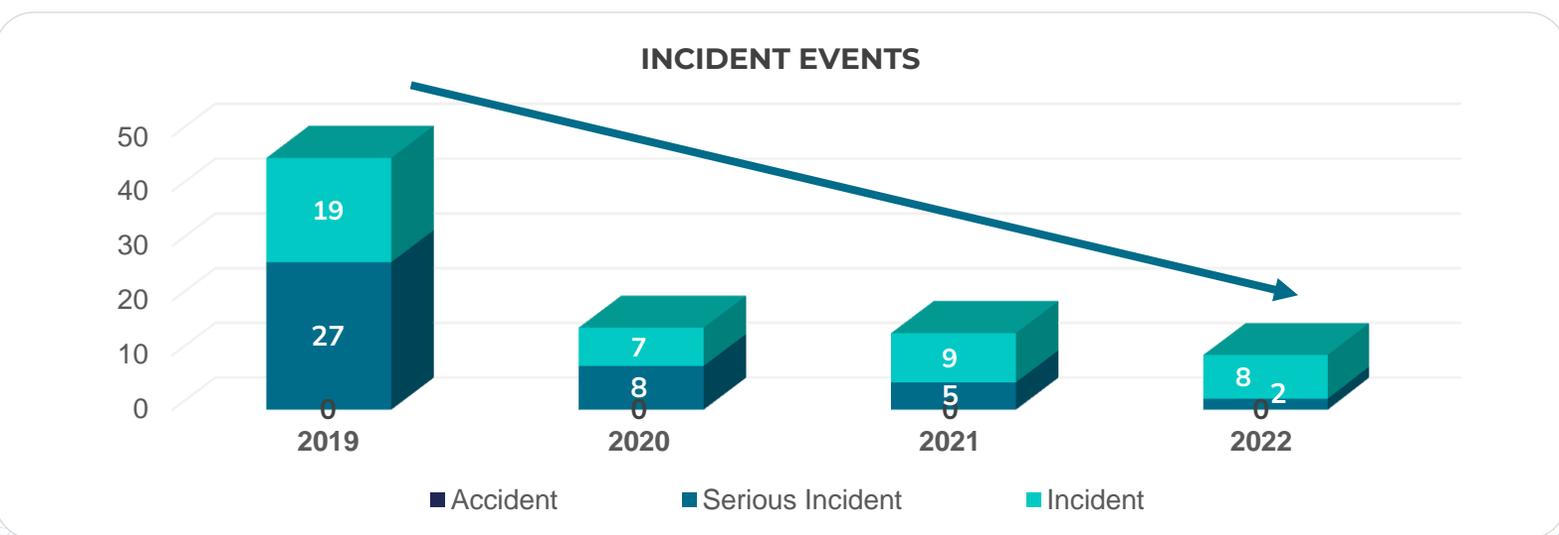
2019

2020

2022

Incident Rate Report 2019-2022

Avoid and reduce Incident with Safety Management System (SMS) Implementation



- Incident Investigation

- Management review

- Hazard Identification & Risk Assessment

- Safety Performance Monitoring

- Audit, surveillance, inspection

- Safety Promotion

Highlight Kinerja Keuangan 2022

1H-2022 & FY2022

Kinerja Keuangan

Description (USD Mio)	FY 2021 Parent	1H-2022 Parent	FY 2022 Parent	FY 2022 Konsolidasi
Cash and Bank	22	69	493	522
Advances for purchase of aircraft	159	146	219	138
Advanced & Security Deposit	150	133	134	224
Bank Loan	674	0	0	16
Trade Payable & Accrued	947	349	296	741
Tax Payable	220	196	175	194
Total Asset	4,789	3,671	4,147	6,235
Total Liabilities	10,094	5,161	4,800	7,770
Total Equity	(5,305)	(1,490)	(653)	(1,535)
Total Revenue	784	490	1,227	2,100
EBITDA Adjusted	(679)	(10)	51	NA
Operating Income (Loss)	(3,431)	(9)	50	104
Net Income (Loss)	(3,812)	3,816	3,819	3,736
Net Income (Loss) (without PSAK73)	(3,306)	4,177	4,416	NA

Fokus Pengelolaan Aspek Keuangan dan Manajemen Risiko (1)



Restrukturisasi Keuangan Melalui PKPU

17 Juni 2022, Kreditur melaksanakan voting PKPU Garuda Indonesia dengan hasil **347 kreditur (95.07%)**, dengan nilai klaim IDR 122 Triliun yang mewakili **12,2 juta total suara (97.46%)** menyetujui Perjanjian Perdamaian Garuda Indonesia.

27 Juni 2022, Perjanjian perdamaian PKPU Garuda Indonesia dinyatakan **Homologasi**.



Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pembiayaan PPA

Pada tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh fasilitas pembiayaan restorasi armada dari **PT PPA** senilai **Rp 725 Miliar**.

Pada akhir tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh penambahan **Penyertaan Modal Negara (PMN)** senilai **Rp 7,5 Triliun**.



Governance Privatisasi

Penatalaksanaan proses privatisasi Garuda Indonesia dengan diterbitkannya **3 Peraturan Pemerintah**: (i) PP No. 43/2022 (PMN), (ii) PP No. 51/2022 (OWK), dan (iii) PP 63/2022 (Perubahan Struktur Permodalan). Termasuk di dalamnya Rights Issue, Konversi OWK, dan Konversi Utang Kreditur.



Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Keuangan YTD Jun-22 Perseroan memperoleh opini laporan keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari KAP.

Laporan Keuangan YTD Des-22 Perseroan memperoleh opini laporan keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari KAP.



Kasasi dan Pendampingan Kejagung

Greytag 1410 dan Greytag 1446 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal **4 Juli 2022** dan **ditolak pada 26 September 2022**. Putusan Homologasi tanggal 27 Juni 2022 telah berkekuatan hukum tetap.

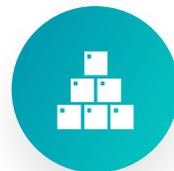
Dukungan positif oleh Kejagung telah memberikan kontribusi kesuksesan proses restrukturisasi Perseroan melalui PKPU.



Membangun Budaya Risiko yang melekat melalui penerapan *Six Eye Principles* & Perbaikan Sistem Prosedur

Dalam mendukung Garuda Indonesia menjadi Perseroan yang unggul, Garuda Indonesia juga melakukan beberapa strategi pendukung di tahun 2022 yakni *assessment risk maturity index* dan pengembangan *governance, risk, compliance*, nilai maturitas risiko Garuda Indonesia di tahun 2022, 3,78, naik sebesar 0,28 poin dari tahun 2021.

Fokus Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko (2)



Pembentukan Sinking Fund

Perseroan membentuk sinking fund sebagai salah satu upaya memenuhi kewajiban Perjanjian Perdamaian PKPU.

Perseroan telah berhasil membentuk **sinking fund sebesar 27,5 Juta USD per 31 Desember 2022** sebagai bentuk komitmen Perseroan atas kewajiban pasca homologasi.



Persetujuan Kredit Luar Negeri (PKLN)

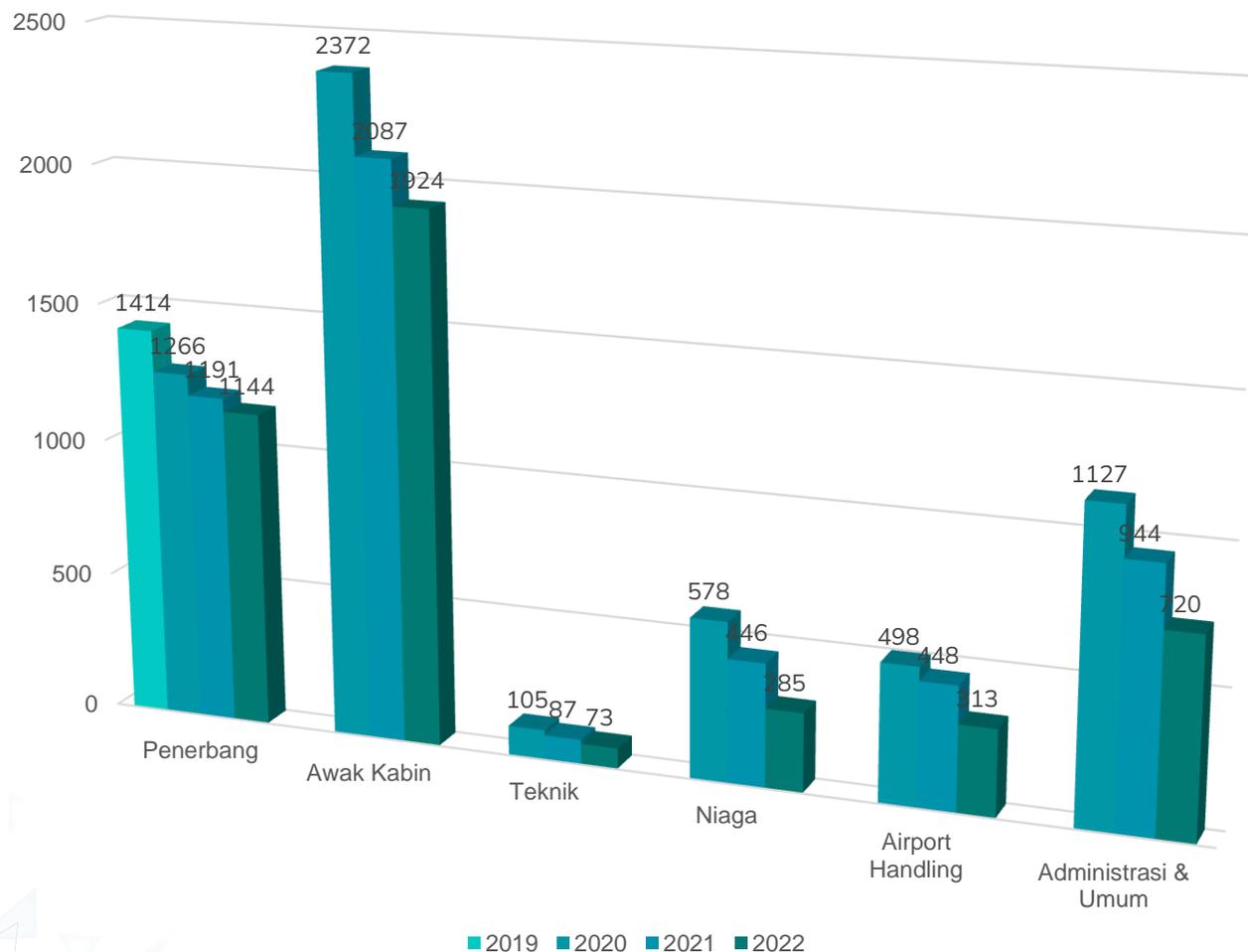
Perseroan berhasil memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan atas Permohonan PKLN Perseroan berupa: penerbitan **Surat Utang Baru maksimum sebesar USD 624.735.352** dan penerbitan **Sukuk Baru maksimum sebesar USD 78.019.581** sebagai bagian dari penyelesaian Restrukturisasi dan Transformasi Perseroan.



Upaya Perbaikan Ekuitas

Posisi ekuitas terus menunjukkan perbaikan dari posisi pada 31 Desember 2021 (audited) sebelum restrukturisasi sebesar; **Konsolidasi: (6,1) Miliar USD**, kemudian pada posisi pada 31 Desember 2022 (audited) sebesar; **Konsolidasi: (1,6) Miliar USD**.

Human Capital Performance Garuda Indonesia



Tahun | Total Pegawai

2019	7.878	↓ 25%
2020	5.946	↓ 12%
2021	5.203	↓ 14%
2022	4.459	

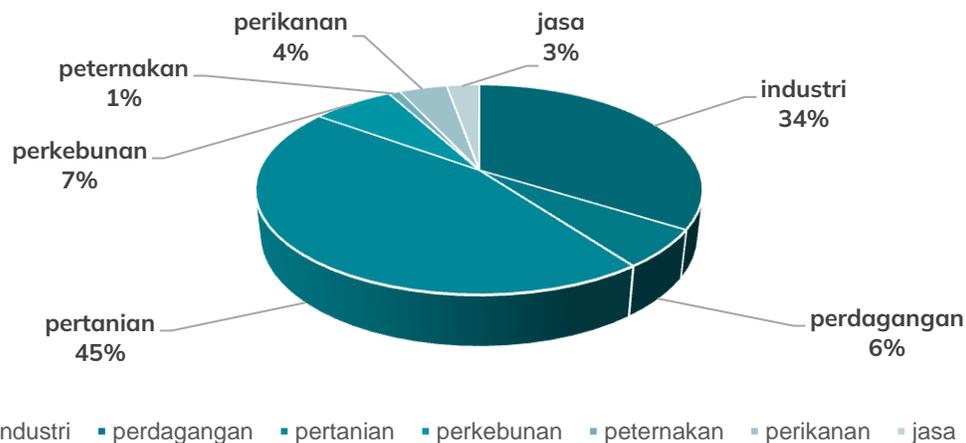
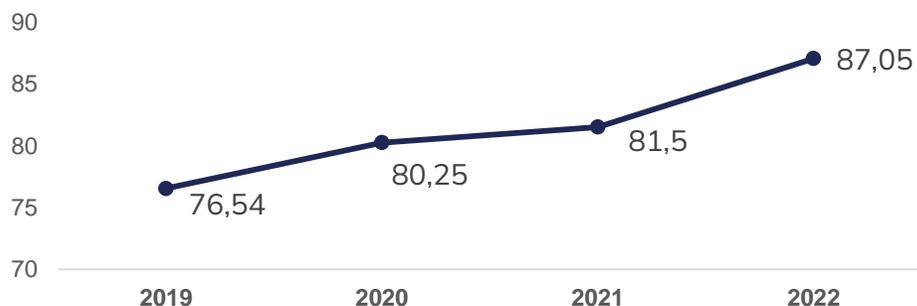
Langkah restrukturisasi Perusahaan turut tercermin dari upaya right-sizing yang dilakukan di mana dalam kurun 4 tahun, terdapat penurunan rasio komposisi pegawai dengan rata-rata 17%

Inisiatif Pengelolaan Human Capital Focus

Penyesuaian Jumlah SDM	2022				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Pensiun Dipercepat	230	224	141	157	752
Penyelesaian Kontrak Dipercepat	21	20	2	35	78
Total	251	244	143	192	830

KINERJA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (PUMK)

Akumulasi Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil



EFEKTIVITAS PUMK TAHUN 2022



KOLEKTIBILITAS PUMK TAHUN 2022



Hingga 31 Desember 2022, Perseroan telah menyalurkan akumulasi dana program PUMK senilai **Rp 87,058 Miliar** dengan persentase penyaluran terbesar di sektor Pertanian (45%) dan Industri (34%).

Tahun 2022, Perseroan menyalurkan dana PUMK sebesar **Rp5,555 Miliar** (*audited*) dengan rincian pencapaian Program PUMK Tahun 2022:

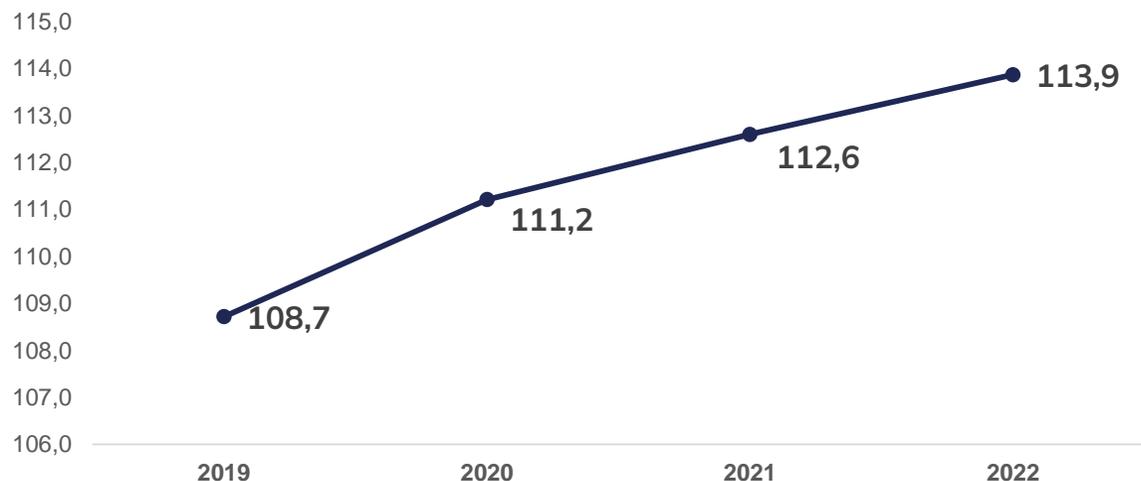
- Efektifitas PUMK sebesar **99,74% (skor 3)** (*audited*)
- Kolektibilitas PUMK sebesar **26,95% (skor 1)** (*audited*)

Berdasarkan Surat KBUMN No. S-170/MBU/03/2023, pencapaian program PUMK adalah sebagai berikut:

- Efektifitas PUMK dengan **skor 3**
- Kolektibilitas PUMK dengan **skor 3**

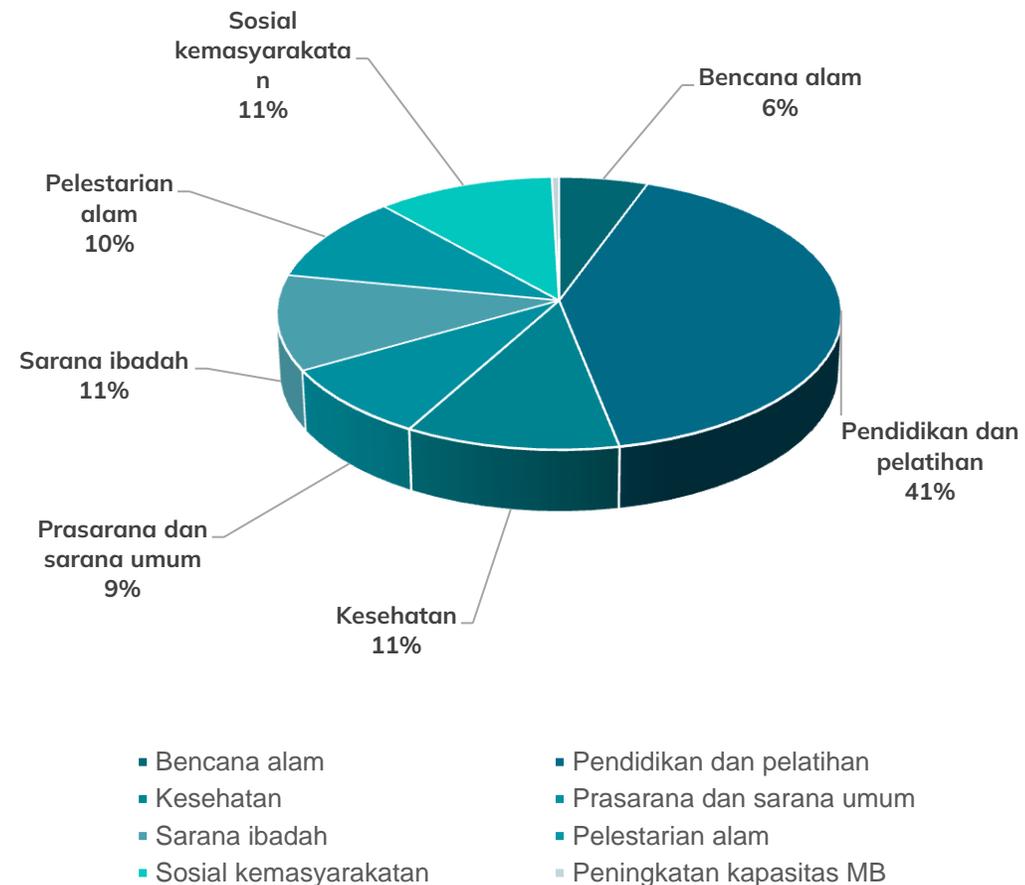
KINERJA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) BUMN

Akumulasi Penyaluran Dana TJSL



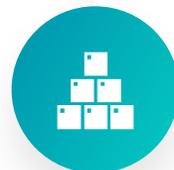
Pada tahun 2022, Perseroan menyalurkan Dana Program TJSL BUMN sebesar **Rp 1,3 Miliar**.

Sampai 31 Desember 2022, Perseroan telah menyalurkan **akumulasi** dana Program TJSL BUMN senilai **Rp 113,8 Miliar** dengan persentase penyaluran terbesar di sektor Pendidikan (41%), kemudian sektor Kesehatan, sarana ibadah, serta bantuan sosial kemasyarakatan (11%).



Anggaran Program TJSL BUMN Tahun 2023

Anggaran Program TJSL BUMN Tahun 2023 ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:



Mengacu Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 30 ayat 1 diatur bahwa *“Dana Program TJSL BUMN bersumber dari: (a) anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan; penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*



Mengacu Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 30 ayat 2 diatur bahwa *“Selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program TJSL BUMN dapat berasal dari: (a) saldo dana program kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau (b) jasa administrasi pinjaman/margin jual beli/porsi bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.”*



Untuk tahun 2023 Dana Program TJSL BUMN dianggarkan sebesar Rp2,5 Miliar oleh Perseroan.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, pada tahun 2022 Garuda Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Pertama-tama, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas capaian yang telah dilakukan pada tahun 2022. Direksi telah mampu menyelamatkan Perseroan dari ancaman pailit dengan berhasil melakukan negosiasi restrukturisasi utang dengan seluruh kreditur termasuk negosiasi harga dan kebijakan sewa pesawat dengan seluruh lessor dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2022 telah menetapkan dan mengesahkan perjanjian homologasi (rencana perdamaian) yang harus dipatuhi oleh Perseroan dan seluruh kreditur. Tak lupa, Dewan Komisaris juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pemegang Saham dan seluruh Kreditur atas dukungannya terhadap pelaksanaan restrukturisasi Perseroan. Tanpa dukungan Pemegang Saham dan Kreditur, niscaya Perseroan dapat melalui tantangan berat tersebut sehingga restrukturisasi melalui sidang PKPU dapat berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 26 September 2022.

Sejalan dengan proses restrukturisasi tersebut, sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC Indonesia), Perseroan dapat membukukan laba periode berjalan sebesar USD3,73 miliar yang sebagian besar berasal dari pendapatan dari restrukturisasi utang sebesar USD2,85 miliar dan keuntungan dari restrukturisasi pembayaran sebesar USD1,38 miliar. Pendapatan usaha Perseroan juga telah mengalami peningkatan menjadi sebesar USD2,10 miliar, atau naik 57,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar USD1,33 miliar.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Dari sisi kinerja operasional, Perseroan selama tahun 2022 telah melayani 14,85 juta penumpang atau naik 35,41% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 10,96 juta penumpang. Jumlah kargo juga berhasil melampaui target 2022 sebesar 123,46% dengan realisasi sebanyak 187.305 ton. Meskipun jumlah penerbangan charter mengalami penurunan sebesar 14,42% namun dari sisi revenue penerbangan charter mengalami peningkatan menjadi sebesar USD174,81 juta atau naik 98,53% dibandingkan tahun 2021 sebesar USD88,05 juta.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris, sepanjang tahun buku 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola Perseroan untuk mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan pendirian Perseroan dengan berpedoman pada RKAP dan RJPP yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Dewan Komisaris telah memberikan nasihat, tanggapan, dukungan dan persetujuan kepada Direksi atas Corporate Action yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain:

1. Nasihat dan arahan terkait rencana dan panduan pelaksanaan restrukturisasi Perseroan.
2. Tanggapan atas Rencana Penyelamatan melalui Restrukturisasi (RPR) Perseroan.
3. Tanggapan atas RPR Perseroan setelah proses negosiasi dengan kreditur.
4. Tanggapan atas Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan.
5. Tanggapan atas Pemutakhiran Rencana Bisnis 2022-2026 (RPR Final) Perseroan.
6. Dukungan atas termsheet restrukturisasi Perseroan.
7. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan tahun buku 2022.
8. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2022.
9. Persetujuan Kontrak Manajemen tahun buku 2022
10. Persetujuan penunjukan Assesor dalam rangka assessment GCG Perseroan.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

11. Persetujuan atas Pedoman Kerjasama di lingkungan Perseroan.
12. Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan.
13. Persetujuan perubahan struktur organisasi induk Perseroan.
14. Persetujuan Batasan Kewenangan (threshold) Perseroan.
15. Persetujuan Penjamin Korporasi kepada Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait Transaksi Sewa Pesawat.

Tindakan Dewan Komisaris berupa masukan, arahan dan saran serta rekomendasi kepada Direksi selengkapnya dapat dibaca pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang termuat dalam Annual Report Perseroan.

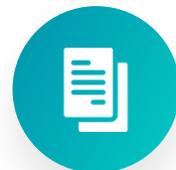
Selanjutnya memperhatikan jalannya Perseroan pada tahun 2022 dan keberlangsungan usaha Perseroan kedepannya, Dewan Komisaris telah dan untuk selanjutnya memberikan arahan, saran dan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah disusun dalam Rencana Penyelamatan melalui Restrukturisasi (RPR) dan Rencana Bisnis Perseroan secara menyeluruh dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta kepentingan stakeholders khususnya Pemegang Saham Perseroan;
2. Meningkatkan pencapaiannya EBITDA positif melalui strategi pengelolaan rute, optimalisasi average fare dan disiplin pengelolaan biaya yang tepat.
3. Meningkatkan pendapatan Perseroan dengan mengoptimalkan resources yang ada saat ini diantaranya melalui peningkatan utilisasi pesawat dan kontribusi penjualan direct channel, optimalisasi bisnis charter dan cargo, pemilihan rute yang profitable dan meningkatkan recurring income melalui anak-anak perusahaan.
4. Memastikan likuiditas pasca homologasi terjaga termasuk penyediaan singking fund yang akan digunakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Melakukan pengendalian beban usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas Perseroan melalui review, standarisasi, serta efisiensi beban dalam rangka pengendalian biaya di semua lini usaha (cost reduction program) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan efektif dan efisien. Setiap beban usaha yang dikeluarkan agar sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Agar mempersiapkan penerapan New Distribution Capability (NDC) yang saat ini sudah diimplementasikan banyak airline sebagai alternatif penghematan biaya penggunaan Global Distribution System (GDS).
3. Menyusun langkah-langkah mitigasi sehubungan dengan adanya tambahan delivery pesawat wide body yang baru mulai tahun 2026 dan seterusnya.
4. Penyesuaian jumlah pegawai dengan armada pesawat yang dimiliki Garuda khususnya cockpit crew dan cabin crew agar memperhatikan rasio berdasarkan tipe pesawat yang berlaku di industri dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk ground staff agar disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ada dengan memperhatikan streamlining struktur organisasi termasuk efisiensi teknologi.
5. Memastikan restrukturisasi dan streamlining anak cucu perusahaan dapat selesai sesuai target waktu yang ditentukan sehingga tidak lagi membebani sebaliknya menjadi pemberi kontribusi positif bagi induk perusahaan serta Perseroan dapat fokus pada core business;
6. Menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang sedang dihadapi Perseroan dengan tetap memperhatikan biaya yang dikeluarkan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Menjalankan pengelolaan praktik bisnis yang sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghilangkan terjadinya fraud baik karena adanya kelemahan prosedur maupun individual SDM;
8. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, catatan, dan saran/rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal yang belum selesai ditindaklanjuti.

Usulan Keputusan Mata Acara 1



Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai Laporan Nomor 000530/2.1025/AU.1/06/0225-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.



Menyetujui Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00872/2.1025/AU.2/11/0225-1/1/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.



Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.



Garuda Indonesia



Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2022.

Penggunaan Laba

1

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diatur bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

2

Pada tahun buku 2022 Perseroan secara konsolidasi mencatatkan laba bersih sebesar **USD 3.736.670.304.**

3

Mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif dan saat ini Perseroan masih mempunyai saldo laba negatif, sehingga tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang saham.

Usulan Keputusan Mata Acara 2



Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Tahun Buku 2022 sebesar **USD 3.736.670.304** (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh ribu puluh tiga ratus empat Dollar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan untuk mengurangi akumulasi rugi Perseroan.

Garuda Indonesia  



Mata Acara 3

Penetapan Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 Dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas Dan Tunjangan) Untuk Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.

Penetapan Tantiem Dan Remunerasi



Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 76 ayat 1, diatur bahwa Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



BUMN dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan.



Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian penghargaan yang layak bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai salah satu faktor menumbuhkan motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja.

Usulan Keputusan Mata Acara 3

1

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Insentif Kinerja Tahun Buku 2022 dan Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2023 bagi Dewan Komisaris Perseroan.

2

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Insentif Kinerja Tahun Buku 2022 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi Perseroan.

Garuda Indonesia  SKYTEAM



Mata Acara 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dan/Atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 Dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (Pumk) Perseroan Tahun Buku 2023.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun 2023

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk dapat melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Pasal 59 ayat 3

Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023
tentang Penugasan Khusus Dan Program
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara Pasal 33 ayat 3

Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 21
ayat 2 huruf c

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
Jasa Keuangan Pasal 13 ayat 1

Kepmen BUMN No.SK-103/MBU/03/2021
tentang Kriteria Kantor Akuntan Publik,
Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor
Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha
Milik Negara

Kriteria dan Alasan Pendelegasian

Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.SK 103/MBU/03/2021 tentang Kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara, ketentuan pemilihan KAP sesuai dengan daftar tabulasi data kantor Akuntan Publik (KAP) pada BUMN.

Adapun pertimbangan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

1

Masih diperlukan waktu untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap KAP yang melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahun 2022.

2

Keterbatasan waktu untuk melakukan proses pengadaan jasa audit atas laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Tahun buku 2023.

Usulan Keputusan Mata Acara 4

1

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2023.

2

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut serta menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.



Garuda Indonesia  

Mata Acara 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar

Latar Belakang

1

Pada saat ini kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), termasuk terkait kegiatan usaha penanganan kargo serta informasi dan komunikasi.

2

Namun demikian dalam kaitannya dengan pengurusan perizinan usaha yang saat ini telah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maka lebih lanjut diperlukan KBLI yang spesifik ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan izin usaha.

3

Adapun dalam perubahan Anggaran Dasar ini, Perseroan tidak melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan, melainkan hanya melakukan penyesuaian deskripsi kegiatan usaha pada Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebagai tindak lanjut dari pengembangan KBLI 2020 yang menjadi dasar dalam pengurusan perizinan usaha kepada pihak yang menerbitkan izin usaha melalui Sistem OSS.

Latar Belakang Terkait Kebutuhan KBLI 52296

Berdasarkan audiensi dan korespondensi dari Perseroan ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Bandar Udara menjawab dan menyampaikan surat kepada Perseroan dengan nomor 108/I/18/DBU-2023. Dalam surat disampaikan bahwa Sertifikat Operasi tidak lagi dikeluarkan oleh Direktorat Bandar Udara dan digantikan dengan Sertifikat Standar yang ada pada OSS RBA.

Diperlukan penyesuaian KBLI 52296 dalam perizinan Jasa Kargo untuk mendapatkan Sertifikat Standar di OSS RBA.

Latar Belakang Terkait Kebutuhan KBLI 63122

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dimana di dalamnya mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) wajib memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mengatur bahwa PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kegiatan usaha terkait dengan aktivitas portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial yang dijalankan oleh Perseroan:

Pengelolaan *e-commerce* Perseroan yaitu:

1

Business to Customers melalui situs www.garuda-indonesia.com, meliputi Loyalty and Ancillary Program;

2

Mobile app Garuda Indonesia serta Contact Center;

3

Business to Customers melalui Garuda Indonesia Contact Center

4

Business to Travel Agent Non-IATA (Garuda Online Sales-GOS) melalui situs www.opa.garuda-indonesia.com.

Usulan Penyesuaian Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 3 ayat 2 Sebelumnya

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

a. Angkutan Udara Niaga

- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51101);
- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51103);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51104);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya (51105);
- Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya (51109);
- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo (51201);
- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo (51203);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51102);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo (51202);
- Angkutan multimoda (52295);
- Aktivitas kebandarudaraan (52231);
- Penanganan kargo (bongkar muat barang) (52240).

Pasal 3 ayat 2 Perubahan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

a. Angkutan Udara Niaga

- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51101);
- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51103);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51104);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya (51105);
- Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya (51109);
- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo (51201);
- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo (51203);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo (51102);
- Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo (51202);
- Angkutan multimoda (52295);
- Aktivitas kebandarudaraan (52231);
- Penanganan kargo (bongkar muat barang) (52240);
- **Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296).**

Usulan Penyesuaian Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan (cont'd)

Pasal 3 ayat 2 Sebelumnya

c. Informasi dan komunikasi:

- Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (62090);
- Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019);
- Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) (62012).

Pasal 3 ayat 2 Perubahan

c. Informasi dan komunikasi:

- Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (62090);
- Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019);
- Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) (62012).
- **Aktivitas portal dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (63122).**

Usulan Keputusan Mata Acara 5

1

Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan KBLI 52296 (Jasa Penunjang Angkutan Udara) dan KBLI 63122 (Aktivitas portal dan/atau platform digital dengan tujuan komersial).

2

Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana keputusan 1 (satu) mata acara Rapat ini.

3

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan 1 (satu) mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Garuda Indonesia



Mata Acara 6

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Republik Indonesia:



- Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Per-1/Mbu/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya;

- Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No.Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya;

- Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Per-3/Mbu/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, berikut seluruh perubahannya.



Latar Belakang

Terdapat 45 Kebijakan Menteri BUMN RI:

41 Peraturan
Menteri BUMN RI

4 Keputusan
Menteri BUMN RI

Dengan kondisi

+ 17 %
peraturan
berusia lebih
dari 10 tahun

Terdapat substansi
yang sama diatur
di beberapa
peraturan

Terdapat beberapa format Peraturan Menteri
yang tidak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.



Peraturan Menteri BUMN RI

Kementerian BUMN RI telah melakukan penataan atas Kebijakan Menteri BUMN RI yang berlaku sebelumnya, menjadi 3 Peraturan Menteri BUMN RI, yaitu:

PER-1/MBU/03/2023

tentang
Penugasan Khusus
dan Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan BUMN

PER-2/MBU/03/2023

tentang
Pedoman Tata Kelola
dan Kegiatan
Korporasi Signifikan
BUMN

PER-3/MBU/03/2023

tentang
Organ dan
Sumber Daya
Manusia BUMN

Substansi Tiga Peraturan Menteri BUMN RI

PER-1

Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN

- Bab I - Ketentuan Umum
- Bab II - Penugasan Khusus
- Bab III - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
- Bab IV - Ketentuan Lain-Lain
- Bab V - Ketentuan Peralihan
- Bab VI - Ketentuan Penutup

PER-2

Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

- Bab I - Ketentuan Umum
- Bab II - Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMN
- Bab III - Penerapan Manajemen Risiko BUMN
- Bab IV - Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
- Bab V - Perencanaan Strategis BUMN
- Bab VI - Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
- Bab VII - Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN
- Bab VIII - Pelaporan
- Bab IX - Ketentuan Lain-Lain
- Bab X - Ketentuan Peralihan
- Bab XI - Ketentuan Penutup

PER-3

Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN

- Bab I - Ketentuan Umum
- Bab II - Syarat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas pada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
- Bab III - Manajemen Talenta Direksi Badan Usaha Milik Negara
- Bab IV - Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- Bab V - Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
- Bab VI - Tata Cara Pemberhentian Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Anak Perusahaan
- Bab VII - Penghasilan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- Bab VIII - Organ Pendukung Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- Bab IX - Ketentuan Lain-Lain
- Bab X - Ketentuan Peralihan
- Bab XI - Ketentuan Penutup

Pengaturan Baru Dalam PER-1/MBU/03/2023

Pengaturan Baru Penugasan Khusus

- BUMN dapat menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional
- Penugasan Khusus harus tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha serta mempertimbangkan kemampuan BUMN
- Setiap Penugasan Khusus harus mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri

Tahapan Penugasan Khusus BUMN

PERENCANAAN

PENETAPAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN

Pengaturan Baru TJSL

- Program Pendanaan UMK
- Penyaluran dan Pembiayaan Syariah
- Pengelolaan Program TJSL BUMN

Tahapan Program TJSL BUMN

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

PELAPORAN

Pengaturan Baru Dalam PER-2/MBU/03/2023

Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMN

- Pemilihan KAP

Penerapan Manajemen Risiko BUMN

- Kebijakan Manajemen Risiko
- Perencanaan, Penerapan, Pemantauan & Evaluasi Manajemen Risiko
- Intensitas Risiko
- Pelaporan Manajemen Risiko

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

- Penilaian menggunakan Peringkat (Rating) yang didasarkan pada Pemeringkatan
- Peringkat (rating) menggunakan Peringkat Korporasi
- Ketentuan Perusahaan Pemeringkat
- Klasifikasi Tingkat Kesehatan

Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

Transaksi Signifikan yang diatur :

- Tambahan PMN
- Restrukturisasi BUMN
- Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi
- Privatisasi
- Pedoman Kerjasama BUMN
- Pengadaan Barang & Jasa BUMN
- Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN
- Pedoman Lindung Nilai BUMN

Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN

- Tata Kelola TI
- Komite Pengarah
- Ketahanan dan Keamanan Siber
- Rencana Strategis TI
- Pengembangan Layanan TI
- Pengelolaan Data
- Arsitektur TI
- Keberlangsungan Layanan TI
- Pelaporan Penyelenggaraan TI

Perencanaan Strategis BUMN

- Perencanaan pada tingkat portofolio BUMN dalam bentuk peta jalan
- RJP 5 Tahunan pada tingkat BUMN
- RKAP Tahunan pada tingkat BUMN
- Kontrak Manajemen Tahunan pada tingkat BUMN
- Rencana strategis TI BUMN

Pelaporan

- Laporan keuangan
- Laporan keadaan jalannya BUMN serta realisasi selama tahun buku
- Rincian permasalahan yang timbul pada tahun buku yang material mempengaruhi kegiatan BUMN
- Analisa kondisi keuangan dan non-keuangan BUMN
- Laporan realisasi KPI
- Laporan tata kelola risiko
- Pelaksanaan program TJSL
- Laporan penyerapan dan pertanggung jawaban PMN
- Laporan pelaksanaan tugas khusus
- Laporan penyelenggaraan TI
- Laporan evaluasi RJP
- Laporan tindak lanjut temuan Auditor dan keputusan RUPS tahun sebelumnya

Pengaturan Baru dalam PER-3/MBU/03/2023

- 1 Daftar & Rekam Jejak
- 2 Talenta Muda Menjadi Direksi
- 3 Sumber Talenta Direksi BUMN
- 4 Single Income Direksi BUMN
- 5 Eligibilitas Tantiem/ Insentif Kinerja
- 6 Penangguhan Pembayaran Tantiem/Insentif Kinerja
- 7 Long Term Incentives
- 8 Konsultasi Penetapan Penghasilan
- 9 Evaluasi Direksi oleh Dekom/Dewas
- 10 Tunjangan Perumahan & Fasilitas Kendaraan
- 11 Cuti Direksi



Usulan Keputusan Mata Acara 6

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Republik Indonesia sebagai berikut:

1

Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

2

Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

3

Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

beserta perubahannya di kemudian hari.

Garuda Indonesia  



Mata Acara 7

Persetujuan Pengalihan Kekayaan Perseroan, Yang Merupakan Lebih Dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.

Overview



Sertifikat HGB No	50
Luas	989 m2
Lokasi	Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat
Masa Berlaku SHGB	24 Oktober 2021
Kronologis	Mengingat sertifikat HGB telah berakhir maka perlu dilakukan proses pembaharuan sertifikat dan pengukuran ulang.

Latar Belakang

1

Bahwa terdapat perbedaan atas luas tanah, dimana dalam Sertifikat HGB seluas 989 m², namun sesuai hasil pengukuran menjadi seluas 943 m², sehingga terdapat selisih luas tanah seluas 46 m².

2

Selisih luas tanah tersebut digunakan untuk kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa trotoar untuk pejalan kaki.

3

Bahwa berdasarkan Blad Rencana Kota Padang tahun 1979 untuk Kawasan Jalan Sudirman, khususnya lokasi tanah Perseroan diperuntukan sebagai trotoar.

4

Bahwa Badan Pertanahan Negara telah menyatakan bahwa status selisih luas tanah tersebut sebagai tanah milik negara dan tidak terdapat ganti rugi atas tanah Perseroan yang digunakan sebagai trotoar atas fasilitas umum.

Nilai Aset

Referensi

Appraisal 2022

Nilai per m2 (IDR)

9.218.504

Luas Tanah yang
Dihapusbukukan (m2)

46

Total (IDR)

424.051.184

Overview

Jenis Aset

Persediaan (*Inventory Stock*)

Nilai Pelepasan

IDR 1.663.558.750

Deskripsi/ Kronologis

1. Persediaan Perseroan yang akan dilakukan pelepasan adalah merupakan persediaan yang masuk dalam kategori *Unsed/Unmoved*.
2. *Unused/Unmoved* persediaan terjadi dikarenakan:
 - Persediaan sudah tidak sesuai dengan spesifikasi yang digunakan saat ini.
 - Persediaan tersebut sudah *obsolete*.
3. Persediaan *unused/unmoved* ini masih tercatat sebagai aset/persediaan dalam pencatatan keuangan Perseroan.

Persediaan Safety Instruction Card

Material Description

Quantity / Each

L38S-SAFETY INSTRCTN CARD (SIC) B747-400	882
L39S-SAFETY INSTRCTN CARD (SIC) A330-300	1,869
L40S-SAFETY INSTCARD (SIC) A330-200 WHITE	8,750
L41S-SAFETY INSTCARD (SIC) A330-200 PINK	8,000
L42S-SAFETY INSTRCTN CARD (SIC) B737-800	21,678
L43S-SAFETY INSTRCTN CARD (SIC) B737-500	945
L45S-SAFETY INSTRCTN CARD (SIC) B737-300	4,676
L89S-SAFETY INSTRCTN CARD(SIC) B737-MAX	2,066
L51S-SAFETY INSTRCTN CARD (SIC) B777-300	1,799
L57S-SAFETY INSTRCTN CARD(SIC) ATR72-600	14,801
L49S-SAFETY INSTRCTN CARD (SIC) CRJ-1000	9,859

Persediaan Seragam & Perlengkapan Awak Kabin

Material Description	Quantity / Each
TIE PRAMUGARA	94
TIE FSM	9
STOCKING	77
TRAVEL BAG CABIN	310
GARMENT BAG CABIN	77
KASAK (CELEMEK) BLUE	4
KASAK (CELEMEK) TOSCA	13
CARDIGAN	1,634
SHIRT LONG SLEEVES PRA	12
SHIRT BATIK TOSCA (ATR)	233
PANTALON TOSCA (ATR)	383

Persediaan Seragam & Perlengkapan Awak Cockpit

Material Description	Quantity / Each
COAT COCKPIT	94
OVER COAT COCKPIT	9
JACKET COCKPIT	77
PANTALON DARK BLUE COCKPIT	310
SHOES COCKPIT MALE	77
GARMENT BAG COCKPIT	4
SUITCASE COCKPIT	13
WING COCKPIT	1,634
FLASHLIGHT (COCKPIT)	12
PET/TOPI CP	233
PET/TOPI FO	383

NILAI ASET



Jenis Persediaan	Total (IDR)
Persediaan (Inventory Stock) Safety Instruction Card	587,048,969
Persediaan (Inventory Stock) Seragam & Perlengkapan Awak Kabin	450,937,721
Persediaan (Inventory Stock) Seragam & Perlengkapan Awak Cockpit	625,572,060
TOTAL	1.663.558.750

Usulan Keputusan Mata Acara 7

Menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan yang akan dilakukan dengan detail sebagai berikut:

- Penghapusbukuan 46 m2 tanah Perseroan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat dari neraca Perseroan, yang sebelumnya seluas 989 m2 menjadi seluas 943 m2.
- Penghapusbukuan atas persediaan Unused/Unmoved (*Inventory Stock*) Perseroan dari neraca Perseroan yaitu sebesar Rp1.663.558.750.

Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagaimana diputuskan dalam poin 1, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

Garuda Indonesia  



Mata Acara 8

Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Penawaran Umum

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan.

Mata Acara ini bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan tanya jawab dan pengambilan keputusan.



Pasal 112 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa Perseroan wajib menyampaikan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada RUPS.



Rencana Penggunaan Dana Berdasarkan Prospektus

Seluruh dana hasil pelaksanaan PUT II sejumlah Rp7.798.474.788.300, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi/biaya penawaran umum sebesar Rp28.725.075.000, akan digunakan Perseroan dengan prioritas peruntukan sebagai berikut:

1

57,7% atau sebesar Rp4,5 Triliun akan digunakan untuk *maintenance*, restorasi dan pemenuhan *maintenance reserve*.

2

42,3% atau sebesar Rp3.298.474.788.300 akan digunakan untuk modal kerja yang termasuk, namun tidak terbatas pada biaya bahan bakar, biaya sewa pesawat dan pembayaran biaya restrukturisasi Perseroan.

Realisasi Penggunaan Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2022

Penggunaan Dana PMN

dalam IDR juta

Description	UOP PMN	Actual YTE 2022	%	Note
	IDR	IDR		
Aircraft Maintenance and Restoration	3,600,000	630,800	17.5%	Pembayaran ke vendor maintenance pesawat Airbus A330 series
Maintenance Reserve	900,000	-	0%	Tidak ada transaksi
Fuel	1,730,000	-	0%	Tidak ada transaksi
Rent	900,000	117,425	13.5%	Pembayaran sewa pesawat ke lessor untuk beberapa pesawat widebody (Boeing 777-300ER) dan narrow body (Boeing 737-800)
Restructuring Costs	370,000	370,000	100%	Pembayaran kepada konsultan restrukturisasi
Total	7,500,000*	1,118,225	15%	

*Total bersih penerimaan PMN Garuda yang berasal dari proceed PMN berjumlah Rp 7,499,999,999,912 dikurangi pengembalian dana sebesar Rp 30,576

Summary:

Per 31 Desember 2022, tercapai penggunaan dana PMN sebesar IDR 1,1 Triliun atau 15% dari total dana PMN.

Dari sejumlah IDR 1,1 Triliun tersebut porsi terbesar yaitu 17,5% adalah untuk pembayaran untuk maintenance dan restorasi mesin pesawat Airbus A330 sebesar USD 40 Juta.

Untuk UOP yang telah dilakukan pembayaran full adalah berkaitan dengan Restructuring Costs yaitu pembayaran kepada Konsultan Restrukturisasi sebesar IDR 370 Miliar.

Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) per 31 Desember 2022

dalam IDR juta

Keterangan	Maintenance & restorasi	Pemenuhan maintenance reserve	Bahan bakar	Biaya sewa pesawat	Biaya restrukturisasi Perseroan	Modal kerja lainnya	Total Dana PUT II Setelah Dikurangi Biaya Penawaran Umum
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	3,600,000	900,000	1,730,000	900,000	370,000	269,750	7,769,750
Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	630,800	0	0	117,425	370,000	145,325	1,263,550
Sisa Hasil Dana Penawaran Umum Terbatas II	2,969,200	900,000	1,730,000	782,575	0	124,424	6,506,200

Keterangan:

Kurs Realisasi Penggunaan: sesuai dengan kurs pada saat dana digunakan

Biaya Penawaran Umum yang telah terealisasi sebesar IDR 12.56 Miliar (dari total biaya IDR 28.73 Miliar)



Mata Acara Ini Bersifat Pelaporan
Sehingga Tidak Terdapat Sesi
Tanya Jawab Atau Pengambilan
Keputusan

Garuda Indonesia  



Mata Acara 9

Perubahan Pengurus Perseroan

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (10) jo. Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 94 jo. Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.



Usulan Keputusan Mata Acara 9

Usulan dari Pemegang
Saham Seri A



TERIMA KASIH

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk